



**WALIKOTA SERANG**  
**PROVINSI BANTEN**

PERATURAN WALIKOTA SERANG

NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

PERLENGKAPAN, PERBENGGKELAN DAN LABORATORIUM

PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN : .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLENGKAPAN, PERBENGGKELAN DAN LABORATORIUM PADA PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang, yang selanjutnya disebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium yang selanjutnya disebut UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

9. Kepala .....

9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium yang selanjutnya disebut Kasubag TU UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini di bentuk UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium, terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium;
  - b. Kepala .....

- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB V TUGAS DAN FUNGSI

### Paragraf 1

#### UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium

### Pasal 5

- (1) UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam bidang pelayanan uji laboratorioum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium mempunyai Fungsi :
- a. penyediaan sarana dan prasarana untuk fasilitas kegiatan UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium;
  - b. pemeliharaan instalasi UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium;
  - c. pengelolaan retribusi pemanfaatan peralatan;
  - d. penyediaan, pembukuan, pemeliharaan/perawatan dan pelaporan prasarana dan sarana kerja; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 2

#### Kepala UPTD

### Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium mempunyai tugas memimpin, merencanakan, membina, mengatur, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium.

(2) Untuk .....

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium mempunyai fungsi :
- a. membantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah yang meliputi peningkatan, pembinaan, pemeliharaan, pengawasan dan perawatan laboratorium dan peralatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mengkoordinir pelaksanaan upaya pelayanan laboratorium dan dan peralatan berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan;
  - c. melaksanakan fungsi pelayanan pemanfaatan peralatan laboratorium dan alat berat;
  - d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan pada sub bagian tata usaha, manager teknis laboratorium dan menager teknis alat berat;
  - e. melaksanakan administrasi pelayanan;
  - f. melaksanakan pengajuan mutu konstruksi bangunan fisik, mutu agregat, aspal, laboratorium tanah, batuan, laboratorium beton dan stabilitas tanah;
  - g. membuat kontrak kerja pengujian;
  - h. membuat laporan hasil pengujian;
  - i. mengeluarkan sertifikat hasil pengujian laboratorium;
  - j. menyusun program kerja UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium;
  - k. membantu dalam pekerjaan konstruksi yakni meliputi alat angkut, alat berat, alat pemindahan tanah dan peralatan pendukung lainnya;
  - l. mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan peralatan alat berat yang meliputi pengoperasian peralatan alat berat, pemeliharaan alat berat serta alat pendukung pekerjaan konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - m. menyusun rencana dan program kerja pengelolaan peralatan alat berat;
  - n. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan peralatan dan alat berat;
  - o. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan peralatan alat berat;
  - p. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam pengelolaan Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - q. memberikan .....

- q. memberikan laporan kepada Kepala Dinas dalam pengelolaan Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Kepala Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan pelaporan serta melaksanakan pembinaan teknis administrasi lingkup UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium, mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
  - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium;
  - c. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan teknis administrasi lingkup UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium;
  - d. penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum;
  - e. penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium;
  - f. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium dengan Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait;
  - g. melaksanakan .....

- g. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, serta rumah tangga;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

#### Paragraf 4

#### Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

#### Pasal 8

- (1) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Dalam hal Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (4) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pemegang Jabatan Pelaksana dan Fungsional yang paling senior.
- (5) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (6) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI

#### TATA KERJA

#### Pasal 9

- (1) Kepala .....



- (1) Kepala UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Kepala UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## BAB VII KEPEGAWAIAN

### Pasal 10

- (1) Kepala Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium merupakan Jabatan Struktural Eselon IV b.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Serang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12 .....

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 11 Januari 2021

WALIKOTA SERANG

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 12 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG

NANANG SAEFUDIN

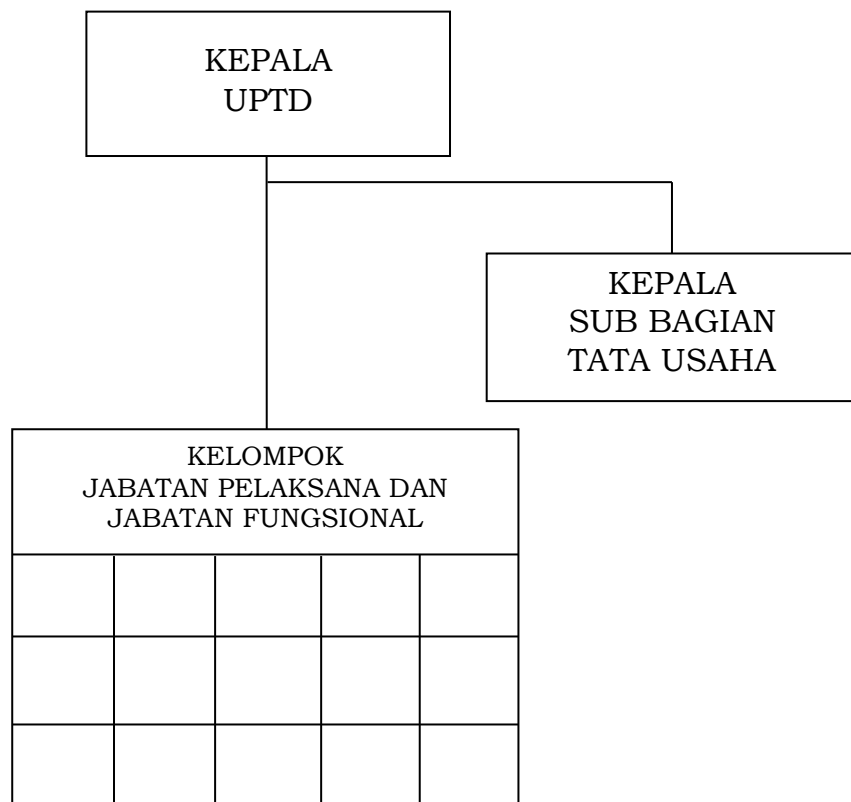
BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2021 NOMOR 97

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SERANG

Nomor : 32 Tahun 2021

Tentang : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH  
PERLENGKAPAN,  
PERBENGGKELAN DAN  
LABORATORIUM PADA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KOTA  
SERANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH  
PERLENGKAPAN, PERBENGGKELAN DAN LABORATORIUM  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SERANG



WALIKOTA SERANG

SYAFRUDIN